

BAB II

PROFIL SOEKIMAN WIRJOSANDJOJO

2.1 Latar Belakang Keluarga

Soekiman merupakan putra dari pasangan Mas Wiryosanjoyo dan Ny. Sukiman yang dilahirkan di Surakarta pada 19 Juni 1989. Mereka hidup di Kampung Beton, Surakarta yang berjarak kurang lebih 200 meter dari Sungai Bengawan Solo.³⁷ Ia merupakan anak bungsu dari empat bersaudara yaitu Kartoyo, Wiyoso dan kakak laki-lakinya yang merupakan pendiri Jong Java bernama Satiman Wirjosandjojo.³⁸ Soekiman tumbuh dan berkembang di lingkungan yang memiliki ajaran agama yang taat. Ibunya dikenal sebagai orang yang terpandang di lingkungannya, karena ia kerap kali mengisi kegiatan keagamaan di kampungnya seperti pengajian untuk perempuan.³⁹ Kondisi lingkungan masyarakat dan orang-orang sekitar Soekiman membuatnya kelak menjadi muslim yang taat dan menghasilkan gagasan-gagasan yang dilandaskannya dari ajaran-ajaran agama Islam, seperti saat ia mendirikan Partai Islam Indonesia dan menjadi ketua Partai Masyumi.

Ayah Soekiman bekerja sebagai seorang pedagang kebutuhan pangan seperti beras dan jagung. Ia berdagang ke beberapa daerah di sekitar wilayah Solo Raya hingga ke luar Jawa Tengah. Mas Wiryosanjoyo mempunyai seorang langganan dagangannya yang berada di daerah Boyolali, Jawa Timur. Orang tersebut

³⁷ Mohamad Roem, *Mengenang Dr. Soekiman*. Jakarta: Yayasan Fajar Shadiq, 1984, hlm. 5.

³⁸ Momon Abdul Rahman, *Jong Java Peranannya dalam Persatuan Bangsa*. Jakarta: Museum Sumpah Pemuda, 2015, hlm. 11.

³⁹ M. Anwar Djaelani, *K.H. Ahmad Dahlan dan Kader-Kader Teladan*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2022, hlm. 8.

merupakan seorang mantan perwira Belanda bernama Van Der Wal.⁴⁰ Perwira tersebut menghabiskan masa pensiunnya dengan mengelola asrama yang diperuntukan sebagai tempat menetap anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS). Keduanya sering bertemu di asrama tersebut karena Van Der Wal telah menjadi langganan Mas Wiryosanjoyo untuk memasok segala kebutuhan asrama yang dijual olehnya, hal tersebut membuat mereka menjadi kerabat dekat.

Mas Wiryosanjoyo yang telah menganggap Van Der Wal sebagai saudaranya, seringkali meminta bantuan kepadanya, salah satunya adalah untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya. Soekiman yang tumbuh dan besar di era politik etis,⁴¹ oleh ayahnya berusaha untuk mendapatkan akses pendidikan bagi dirinya. Keberadaan politik etis menjadikan masyarakat bumiputera mendapatkan peluang untuk mendapatkan akses pendidikan, hal tersebut disebabkan oleh keinginan Pemerintah Kolonial Belanda untuk menguatkan posisinya di wilayah tanah jajahan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan ini.⁴² Mas Wiryosanjoyo berusaha untuk memasukan anaknya ke sekolah yang dikelolanya di Boyolali. Ia menganggap pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan sehingga Mas Wiryosanjoyo ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, sampai mereka bisa menghidupi dirinya sendiri.

⁴⁰ Lukman Hakiem, *Soekiman: Sebuah Biografi Politik Pemimpin Pertama Partai Masyumi dan Kontribusinya Untuk Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022, hlm. 27.

⁴¹ Politik etis merupakan sebutan bagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda sebagai bentuk balas budi kepada masyarakat Indonesia yang mengarah pada beberapa aspek seperti irigasi, emigrasi dan edukasi.

⁴² Adi Kurniawan, dkk, "Irigasi dan Pendidikan Politik Etis di Kota Metro", *The Indonesian Journal of Social Studies*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 42.

Soekiman yang sudah beranjak dewasa ketika tamat sekolah di School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) dan dianggap usianya sudah cukup matang untuk mendapatkan pasangan hidup, mulai merasakan dorongan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk segera menikah. Soekiman akhirnya menemukan wanita yang menjadi pasangan hidupnya saat dirinya mengikuti Kongres Jong Java di Bogor pada sekitar tahun 1920-an. Wanita tersebut bernama Kustami, ia adalah putri dari Dr. Keramat yang berasal dari Bogor. Momen pertemuan keduanya terjadi ketika Soekiman yang sedang menyampaikan pidato mengenai pentingnya persatuan.⁴³ Kustami merasa terpukau melihat pidato yang disampaikan oleh Soekiman, ia menganggap dirinya mempunyai harapan dan tujuan yang sama dengan Soekiman untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kustami dan Soekiman melangsungkan pernikahannya pada tahun 1923, yaitu satu tahun sebelum keberangkatannya ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Keduanya harus rela menjalani hubungan jarak jauh, meskipun demikian Kustami tetap mendukung keinginan suaminya tersebut dengan harapan Sukiman berhasil menyelesaikan studinya dengan baik dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kustami dan Soekiman memiliki 3 anak dari hasil pernikahannya yaitu Sakri Sunarto, Bagus Sukardono dan Sartini.⁴⁴ Ayah tiga orang anak tersebut sangat menyayangi keluarganya, hal ini ditunjukkan dengan penggunaan nama anak Soekiman yaitu Sakri Sunarto sebagai nama samaran dirinya saat menulis

⁴³ Lukman Hakiem, *op. cit.*, hlm 30.

⁴⁴ Muchtaruddin Ibrahim, *Dr. Soekiman: Hasil Karya dan Pengabdianya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982, hlm. 29.

kritik terhadap kolonialisme ketika dirinya menempuh pendidikan dokter di Belanda dan sebagai ketua Perhimpunan Indonesia.⁴⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa Soekiman tetap mengingat keluarganya meskipun jarak yang sangat jauh memisahkan mereka.

2.2 Riwayat Pendidikan

Abad ke-19 Pemerintah Kolonial Belanda mempertimbangkan sesuatu yang mereka anggap penting untuk menguatkan posisi mereka di tanah jajahan, salah satunya pada aspek pendidikan. Pemerintahan Kolonial Belanda pada umumnya cenderung membatasi akses pendidikan bagi penduduk bumiputera dan hanya diperuntukan untuk kalangan bangsawan saja.⁴⁶ Lembaga pendidikan pada era pendudukan Belanda salah satunya adalah Europeesche Lagere School (ELS) yang pertama kali didirikan pada 1817. ELS lebih memiliki akses yang luas karena tidak hanya diperuntukan bagi kaum bangsawan saja, melainkan bangsa Timur dan bumiputera keturunan bangsawan juga.⁴⁷ Pemerintah Kolonial Belanda beranggapan jika mereka bisa meningkatkan kualitas sumber daya penduduk bumiputera, maka hal itu akan menguntungkan mereka di tanah jajahan.

ELS menjadi lembaga pendidikan pertama Soekiman sebelum ia mendalami studi kedokteran dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah Kolonial Belanda melakukan pembatasan bagi masyarakat bumiputera untuk mendapatkan sarana pendidikan, sehingga jarang sembarang orang yang dapat mengenyam pendidikan

⁴⁵ Mardanas Safwan, *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri, S.H. Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983, hlm. 27.

⁴⁶ Evita Pratiwi dan Sarkawi B. Husein, "Europeesche Lagere School and the Birth of Bumiputera Intellectual Elite in Bojonegoro East Java", *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol. 31, No. 2, 2021, hlm. 251.

⁴⁷ Djohan Makmur, dkk, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, hlm 76.

di era tersebut.⁴⁸ Pendapat tersebut nampaknya berusaha dipatahkan oleh Mas Wiryosanjoyo yang berusaha agar anaknya bisa sekolah dengan meminta bantuan kepada kawannya di Boyolali. Van Der Wal yang merupakan teman dekat ayah dari Soekiman menjadi sosok yang berperan penting untuk jalan pendidikannya, ia mengizinkan Soekiman untuk bersekolah di ELS Boyolali yang dikelola olehnya. Soekiman menempuh pendidikan di ELS pada tahun 1907 dan selesai di tahun 1914 bersama dengan kakaknya Satiman Wirjosandjojo.

Soekiman bersama dengan kakaknya Satiman Wirjosandjojo,⁴⁹ kembali melanjutkan pendidikannya yaitu di School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) yang terletak di Batavia serta mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kolonial Belanda untuk keduanya selama menempuh pendidikan di sana.⁵⁰ Kedua bersaudara tersebut selain sebagai pelajar, mereka juga aktif di organisasi pemuda Jong Java yang didirikan pada 7 Maret 1915 di Batavia dengan Satiman Wirjosandjojo menjadi penggagas utama sekaligus ketua yang pertama.⁵¹ Jong Java menjadi salah satu organisasi yang menggagas persatuan pemuda di Hindia Belanda, seperti yang pernah dilakukan oleh Soekiman yang berusaha untuk menyatukan antara Jong Java dengan Jong Sumatranen Bond saat ia menjadi ketuanya.⁵² Usulan penyatuan kedua kelompok pemuda tersebut terjadi pada

⁴⁸ Atashendartini Habsjah, dkk, *Perjalanan Panjang Anak Bumi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2010, hlm. 28.

⁴⁹ Potret wajah Dr. Satiman Wirjosandjojo yang merupakan kakak dari Soekiman dan pendiri perkumpulan pemuda *Jong Java* dapat dilihat dalam lampiran 2.

⁵⁰ Manus, *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, hlm. 102.

⁵¹ Pada awal pembentukannya organisasi Jong Java bernama Tri Koro Dharmo yang artinya “Tiga Tujuan Mulia”, yang merupakan perpecahan dari Budi Utomo.

⁵² Momon Abdul Rahman, dkk, *Sumpah Pemuda: Latar Sejarah dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional*. Jakarta: Museum Sumpah Pemuda, 2008, hlm. 31.

Desember 1921, ketika berlangsungnya Kongres Jong Java yang keempat di Bandung, namun pembentukan federasi tersebut tidak berhasil karena belum ada kesepakatan jumlah delegasi yang akan diikutsertakan.

Organisasi ini juga menjadi wadah bagi Soekiman dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekiman pernah menjabat sebagai ketua di organisasi ini selama dua periode yaitu 1918-1919 dan 1920-1921. Periode pertama Soekiman menjadi ketua, ia menambah beberapa cabang Jong Java di beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan di periode kedua Soekiman mengisyaratkan kepada anggota perempuan untuk ikut serta melakukan propaganda tujuannya agar kaum perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki tanpa membedakan aspek-aspek tertentu.⁵³ Soekiman yang telah melewati dinamika masa pendidikannya di STOVIA, pada akhirnya ia berhasil menamatkan pendidikannya di lembaga pendidikan tersebut pada tahun 1922 dengan memperoleh gelar *Indische Art* (Dokter Jawa).⁵⁴ Ia menyelesaikan pendidikan di STOVIA dengan masa studi kurang lebih 10 tahun yang dimulai pada 1912 dan selesai di tahun 1922 dengan fokus studi pada ilmu kedokteran.

Gelar *Indische Art* ini membawa Soekiman untuk melanjutkan studinya ke negeri Belanda di Universitas Amsterdam. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh hebat lainnya ketika menempuh pendidikan di Belanda, sekaligus memulai ketertarikannya pada dunia politik sebagai upaya untuk memperjuangkan

⁵³ A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1994, hlm. 114.

⁵⁴ Djoko Marihandono & Harto Juwono, *Perkembangan Pendidikan Kedokteran di Weltevreden: 1851-1926*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, hlm. 300

kemerdekaan Indonesia. Lingkungan intelektual dan dinamika sosial-politik di Belanda kala itu turut membentuk pandangan Soekiman mengenai pentingnya perjuangan kolektif untuk kemerdekaan Indonesia. Ia ketika di Belanda mulai memiliki ketertarikan terhadap dunia politik, sebagai sarana strategis untuk membebaskan tanah air dari belenggu kolonialisme.

Pelajar lulusan STOVIA ini melanjutkan pendidikannya di Universitas Amsterdam. Soekiman mulai menempuh studi di kampus ini sejak tahun 1923 dengan mengambil studi spesialis penyakit paru-paru. Keinginan Soekiman untuk menempuh studi di Belanda sempat mengalami hambatan ketika ia masih di STOVIA, sebab dirinya sempat menerima dan bekerja di perusahaan kereta api. Ayah Soekiman yang mengetahui hal tersebut langsung bertindak dengan memberi nasihat agar ia tetap melanjutkan studinya, yang kemudian disetujui oleh Soekiman namun dengan syarat agar dirinya bisa melanjutkan studi ke Belanda untuk memperoleh gelar *Arts*⁵⁵ dan keinginan tersebut disanggupi oleh ayahnya.⁵⁶ Soekiman berangkat ke Belanda pada sekitar pertengahan tahun 1923 dengan menumpangi kapal Johan de Wit dan menjadi satu-satunya penumpang yang berasal dari Hindia Belanda.⁵⁷

Ilmu kedokteran yang telah Soekiman dapat ketika masih di STOVIA, ia pelajari lebih jauh dengan memperdalam pada studi ahli penyakit paru-paru. Penyakit ini telah menjangkit penduduk bumiputera sejak lama dan masih kurang

⁵⁵ *Arts* Merupakan gelar akademik bagi pelajar yang menempuh studi lanjutan ilmu kedokteran.

⁵⁶ Muchtaruddin Ibrahim, *op.cit*, hlm. 14-15.

⁵⁷ Informasi mengenai transportasi yang digunakan Soekiman ketika menuju Belanda dimuat dalam surat kabar *De Indische Courant*, 23 Juli 1923 dapat dilihat dalam lampiran 3.

penanganan karena kurangnya dokter bumiputera yang mahir dalam penyakit paru-paru.⁵⁸ Pemerintah kolonial baru berusaha serius untuk menangani penyakit ini pada sekitar tahun 1917, karena tidak menjadi wabah yang besar dan mematikan seperti penyakit Pes atau Sampar, Kolera, atau Malaria. Soekiman yang dapat mengenyam pendidikan di Belanda menjadi kesempatan berharga baginya yang tidak dapat dirasakan oleh banyak orang pada era tersebut. Hal ini juga sebagai pembuktian bahwa orang Hindia Belanda pada masa itu tidak dapat dipandang rendah dalam hal intelektual dan belum mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi.⁵⁹ Soekiman dapat menyelesaikan masa studinya di Belanda pada tahun 1926 dengan menyandang gelar *Arts* dengan fokus studinya di kedokteran spesialis penyakit dalam. Ia kemudian pulang ke tanah air sekitar tahun 1927 sebagai dokter lulusan Belanda.

Soekiman yang lulus sebagai seorang dokter, tentunya memiliki harapan dapat mengimplementasikan apa saja yang telah ia dapat selama menempuh studi di Belanda yaitu dengan mengabdikan ke masyarakat sebagai seorang dokter. Mas Wiryosanjoyo memiliki salah satu kerabat dekat yang merupakan pengurus organisasi Muhammadiyah yaitu K.H. Fakhruddin, ia menginginkan agar anaknya ketika selesai studi dari Belanda dapat bekerja di Rumah Sakit Penolong Kesengsaraan Oemoem (RS-PKO) Muhammadiyah.⁶⁰ Organisasi Muhammadiyah sebagai pemilik rumah sakit tersebut, secara sistematis menjadikan Soekiman

⁵⁸ Farabi Fakhri, dkk, *Perdana Menteri Republik Indonesia 1945-1959: Pergumulan Menegakkan Demokrasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, hlm. 255.

⁵⁹ Mohamad Roem, *op.cit.*, hlm. 15.

⁶⁰ Djarnawi Hadikusuma, *Matahari-Matahari Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 2010, hlm. 32.

sebagai salah satu kader dalam organisasi masyarakat Islam ini meskipun dalam perkembangannya Soekiman lebih tertarik pada dunia politik dengan memutuskan untuk bergabung bersama Sarekat Islam (SI),⁶¹ sehingga dirinya cenderung menjadi anggota pasif di Muhammadiyah, namun ia tetap berkontribusi pada Muhammadiyah sebagai penasihat medis di RS-PKO Muhammadiyah.

Dokter lulusan Belanda ini selain sebagai dokter yang berpolitik juga aktif menulis karya ilmiah. Soekiman pernah menulis sebuah karya ilmiah dengan topik pengobatan pada penyakit paru-paru. Tulisan karya ilmiah Soekiman berjudul *Over den duur der kunstmatige pneumothorax-behandeling van de long tuberculose* atau dalam Bahasa Indonesia artinya “Durasi pengobatan Pneumotoraks/Metode Suntikan Hawa Buatan Pada Tuberkulosis Paru-Paru”,⁶² yang terbit dalam jurnal *Geneeskundig Tijdschrift van Nederlandsch Indie*.⁶³ Soekiman dalam papernya menjelaskan bahwa pengobatan Tuberkulosis di Hindia Belanda berbeda kondisinya dengan gambaran klinis *phthisis* paru kronis di Eropa dan seringkali bersifat akut, dengan demikian menurut Soekiman durasi pengobatan *pneumothorax* harus diperpanjang yaitu tidak kurang dari dua tahun khususnya bagi pekerja lanjut usia dan pekerja aktif.⁶⁴ Ketertarikan dirinya pada dunia politik tidak membuat Soekiman lupa akan latar belakang pendidikannya keduanya berjalan beriringan dilakukan olehnya selama masa hidupnya.

⁶¹ Lasa Hs, dkk, *100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah, 2014, hlm. 215-2016.

⁶² Tulisan karya ilmiah Soekiman juga terbit pada majalah *Pemandangan* edisi 10 Agustus 1937. Dapat dilihat dalam lampiran 4.

⁶³ Nama sebuah jurnal kedokteran di Hindia Belanda.

⁶⁴ *Pemandangan, Ibid.*

2.3 Riwayat Organisasi Politik

Soekiman memulai kiprahnya di bidang politik ketika ia menempuh pendidikan di Belanda yang mana dirinya bergabung dengan organisasi perkumpulan pelajar-pelajar Hindia Belanda bernama Perhimpunan Indonesia (PI).⁶⁵ Organisasi ini dibentuk sebagai respon dari adanya rasa kesadaran nasional serta menjalin kekeluargaan dan persatuan para pelajar yang tengah menempuh pendidikan di Belanda.⁶⁶ Mereka beranggapan bahwa perjuangan untuk menjadi bangsa yang merdeka dapat dilakukan dimana saja, termasuk saat menempuh pendidikan di negeri orang, oleh karena hal tersebut terbentuklah organisasi perkumpulan pemuda bernama Perhimpunan Indonesia pada tanggal 15 November 1908.

Penggagas utama berdirinya Perhimpunan Indonesia di antaranya yaitu Soetan Kasajangan Soripada Harahap, Sosro Kartono, Husein Djajadiningrat, Raden Mas Noto Soeroto, Notodiningrat, Sumitro Kolopaking dan dr. Apituley, dengan ketua pertamanya adalah Soetan Kasajangan yang menjabat dari tahun 1908 sampai 1915.⁶⁷ Gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia tampak cukup jelas terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terkemuka, termasuk para mahasiswa Hindia Belanda di Belanda, hal ini menunjukkan dampak besar dari

⁶⁵ Pada awal pembentukannya, organisasi ini bernama Indische Vereeniging, kemudian diganti menjadi Indonesische Vereeniging ketika dipimpin oleh Herman Kartowisastro pada 1921-1922, dan kemudian berganti lagi menjadi Perhimpunan Indonesia ketika dipimpin oleh Soekiman Wirjosandjojo. Lihat dalam A.K. Pringgodigdo, *op.cit.* hlm. 56-57. Pada bagian selanjutnya, istilah Perhimpunan Indonesia akan disebut PI.

⁶⁶ Yusinta Tia Rusdiana, Heryati, Yuliarni, "Peran Organisasi Perhimpunan Indonesia dalam Upaya Mencapai Kemerdekaan di Belanda", *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 55-56.

⁶⁷ Sudiyo, *Perhimpunan Indonesia*. Jakarta: Bina Adikarsa, 2004, hlm. 42.

politik etis terhadap kesadaran nasional akan pentingnya menjadi bangsa yang merdeka dari cengkraman pihak asing.

PI sendiri pada awalnya hanya sebuah organisasi yang berfungsi sebagai wadah persaudaraan antar pelajar Hindia Belanda di Belanda dan tidak berorientasikan pada gerakan politik. Haluan organisasi tersebut mulai berubah pada sekitar tahun 1913 ketika tokoh Tiga Serangkai⁶⁸ diasingkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda karena membentuk sebuah perkumpulan politik yang dilakukan oleh mereka melalui Indische Partij dan dianggap membahayakan Pemerintah Kolonial Belanda.⁶⁹ Ketiga tokoh tersebut pada awalnya merupakan anggota dari Budi Utomo, namun mereka menganggap Budi Utomo terlalu lambat dalam melakukan pergerakan sehingga ketiganya membuat perkumpulan politik sendiri. Mereka datang ke Belanda dan bergabung bersama PI membawa gagasan kebangsaan dan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan masuknya tokoh Tiga Serangkai menjadikan arah pergerakan PI tidak hanya sosial saja melainkan ke ranah politik, yang kemudian ditunjukkan dengan terbitnya majalah *Hindia Poetra* pada 1916 sebagai media propaganda.⁷⁰

Soekiman bergabung dengan PI pada tahun 1923, tepatnya ketika organisasi ini sudah berusia 15 tahun yang pada saat itu dipimpin oleh Nazir Datuk Pamuntjak dengan nama organisasinya masih Indonesische Vereeniging. Nama tersebut kemudian diganti menjadi Perhimpunan Indonesia yang merupakan arti terjemahan

⁶⁸ Tiga Serangkai merupakan sebutan bagi tiga tokoh pendiri Indische Partij yaitu Tjipto Mangunkusumo, Ernest Douwes Dekker, dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat.

⁶⁹ John Ingleson, *Perhimpunan Indonesia and the Indonesian Nationalist Movement 1923-1928*. Canberra: Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1975, hlm. 1.

⁷⁰ Atikoh & Sardiman, "Perhimpunan Indonesia Sebagai Organisasi Pergerakan Indonesia yang Revolusioner (1922-1930)", *Risalah*, Vol. 2, No. 6, 2016, hlm 2-3.

dari Indonesische Vereeniging dengan pengusul awalnya adalah Achmad Soebardjo selaku ketua organisasi ini pada periode 1919-1921, namun perubahan nama ini baru direalisasikan pada era kepemimpinan Soekiman di tahun 1925.⁷¹ Ia dipilih sebagai ketua PI untuk periode 1924-1925 sekaligus sebagai ketua penyusunan buku *Gedenkboek Indonesische Vereeniging 1908-1923*, yaitu buku yang berisi kritik-kritik terhadap pemerintah Belanda dalam rangka 15 tahun berdirinya PI.⁷² Soekiman dalam penyusunan buku ini menulis artikel dengan judul *Nieuwe Banen*,⁷³ yang berisi tentang peran penting pemuda dalam pergerakan kemerdekaan serta strategi dalam menuntut keadilan terhadap pemerintahan kolonial. Ia menyebutkan beberapa gerakan revolusi yang terjadi di beberapa belahan dunia seperti India dan Prancis diprakarsai oleh kaum pemuda, selain itu Soekiman juga mengharapkan agar pemuda terlibat dalam gerakan kebangkitan nasional.⁷⁴ Dalam suatu paragraf Soekiman menyebutkan:

Juga dalam dunia kecil kami yang berfungsi sebagai pos terdepan masyarakat Indonesia di Eropa, perkembangan rasa kebangsaan sangat menggembirakan. Sekarang telah benar-benar diinsyafi bahwa kebangkitan suatu bangsa sulit terlaksana tanpa dorongan putera-puteranya yang terpelajar.⁷⁵

Bagi Soekiman, pemuda memegang peranan penting dalam sebuah gerakan revolusi pada suatu negara yang tengah mengalami masa-masa sulit sebagai bangsa yang terjajah oleh pihak asing. Pemuda memegang peranan krusial dalam

⁷¹ Sudiyo, *op.cit*, hlm. 42-45. Adapun untuk susunan organisasi PI era kepemimpinan Soekiman di antaranya, ketua dijabat oleh Soekiman Wirjosandjojo, wakil ketua dijabat oleh Arnold Mononutu, bendahara dijabat oleh Moh. Hatta, sekretaris dijabat oleh Suroso dan Sunario. Lihat dalam Sudiyo, *loc.cit*.

⁷² *Ibid*, hlm. 100.

⁷³ Tulisan Soekiman termuat pada *Gedenkboek Indonesische Vereeniging 1908-1923*. Dapat dilihat pada lampiran 5.

⁷⁴ Amir Hamzah Wiryosukarto, *Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot*. Malang: YP2LPM, 1984, hlm. 9-11.

⁷⁵ *Ibid*.

menggerakkan roda revolusi, terutama di tengah situasi bangsa yang masih terjajah. Ia melihat pemuda, khususnya mahasiswa yang tidak sekadar mengejar ilmu di bangku kuliah, melainkan sebagai garda depan dalam membentuk arah dan wajah masa depan bangsa.

Majalah terbitan PI yang semula bernama *Hindia Poetra* diubah menjadi *Indonesia Merdeka* ketika organisasi ini dipimpin oleh Soekiman. Nama ini diganti bertujuan untuk memasifkan pergerakan PI agar mencakup khalayak yang lebih banyak khususnya mahasiswa Hindia Belanda yang sedang menempuh pendidikan di Eropa.⁷⁶ Implementasi dari perubahan nama tersebut Soekiman tuangkan dalam sebuah keterangan asas, yang isinya tentang arti sebuah kesadaran mengenai menjadi suatu bangsa yang merdeka, perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, dan pentingnya persatuan untuk mencapai tujuan tersebut.⁷⁷ Melalui tulisan di *Gedenkboek* dan keterangan asas yang disampaikan oleh Soekiman menjadikan PI semakin dikenal di daerah Eropa, hal tersebut tentu menjadi langkah positif sebagai bentuk propaganda dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Soekiman kembali ke tanah air ketika ia telah selesai menempuh studi kedokterannya di Universitas Amsterdam pada 1926 dengan menyandang gelar *Arts* sebagai lulusan di kampus ini.

Soekiman yang kembali ke Hindia Belanda kemudian melanjutkan kiprahnya di bidang politik dengan bergabung bersama partai yang berhaluan Islamis yaitu Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Partai ini merupakan partai politik yang

⁷⁶ Sudiyo, *op.cit*, hlm. 60.

⁷⁷ Harry A. Poeze, *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di negeri Belanda 1600-1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008, hlm. 176

terbentuk pada era kolonial Belanda tepatnya tahun 1923. Organisasi ini pada mulanya merupakan organisasi dagang yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada 1911 di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang tujuannya untuk memajukan pedagang-pedagang Islam Bumiputera.⁷⁸ Haji Samanhudi yang merasa SDI tidak cukup berkembang meminta HOS. Tjokroaminoto untuk bergabung dan memimpin SDI, ia merasa pedagang bumiputera kalah saing dengan pedagang Tionghoa. HOS. Tjokroaminoto bergabung dengan SDI pada 10 November 1912 dan kemudian mengganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI), perubahan nama tersebut bertujuan agar organisasi ini dapat menjangkau banyak kalangan dan bergerak pada bidang sosial, politik dan kebudayaan.⁷⁹

PSII yang diikuti Soekiman mencerminkan adanya pengaruh lingkungan keluarga dan orang terdekat dalam menentukan pandangan ideologi seseorang. Ia tumbuh dan berkembang di lingkungan religius dengan ibunya yang dikenal terpendang religius, serta pengalaman kerja Soekiman yang pernah mengabdikan di rumah sakit milik Muhammadiyah membawa dirinya untuk bergabung dengan partai politik Islam. Hal ini sejalan dengan teori psikologi menurut Woodworth dan Marquis yang menyatakan bahwa aktivitas manusia dari lahir hingga akhir hayatnya memiliki hubungan erat dengan lingkungan sekitar seperti keluarga, tempat tinggal, lingkungan pendidikan dan genetik manusia itu sendiri. Psikologi juga memandang karakteristik manusia dalam interaksi dengan faktor lingkungan dan dampaknya pada perkembangan individu tersebut pada masa yang akan datang,

⁷⁸ Pringgodigdo, *op. cit*, hlm. 4.

⁷⁹ Wahyu Iryana, *Pergerakan Nasional: Melacak Akar Historis Perjuangan Bangsa Indonesia dan Kiprah Kaum Santri dalam Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Prenada, 2022, hlm. 21.

artinya apa yang didapat oleh seseorang sekarang akan mempengaruhi pola pikir dan cara pandang individu tersebut. Soekiman bertemu dengan tokoh-tokoh Islam yang juga mempengaruhi cara pandang dirinya, seperti H. Agus Salim dan HOS. Tjokroaminoto.

Soekiman mulai bergabung dengan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)⁸⁰ pada 1927, setelah sebelumnya ia mengabdikan diri di Rumah Sakit Penolong Kesengsaraan Oemoem Muhammadiyah sekaligus telah menjadi kader organisasi Muhammadiyah dan kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama partai yang saat itu pimpinan oleh HOS. Tjokroaminoto dan didampingi H. Agus Salim.⁸¹ PSII di masa ini telah mengalami perpecahan akibat masuknya ideologi komunis yang dibawa oleh Henk Sneevliet serta kemunculan partai-partai lain seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan ideologi nasionalisnya yang didirikan pada 1927.⁸² Partai-partai yang bermunculan dengan ideologi berbeda membuat mereka bersaing satu sama lain untuk mendulang popularitas dan merekrut anggota sebanyak-banyaknya, meskipun pada dasarnya tujuan mereka sama yaitu untuk mewujudkan bangsa yang merdeka. Permasalahan tersebut kemudian memunculkan sebuah gagasan untuk membentuk sebuah wadah berbentuk badan federasi yang bisa menampung partai-partai politik dengan nama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

⁸⁰ Partai ini ketika Soekiman bergabung masih bernama Partai Sarekat Islam (PSI) dan baru berganti menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1929. Perubahan nama ini diusulkan oleh Soekiman yang dianggap olehnya lebih nasionalis dan pembaharuan setelah terjadi beberapa konflik di internal partai. Lihat dalam Ismail, dkk, *Gaya Tjokroaminoto Meyakinkan Para Pemuda Agar Terhubung dengan Sarekat Islam*. Jakarta: Tempo Publishing, 2023, hlm. 56.

⁸¹ Muchtaruddin Ibrahim, *op.cit*, hlm. 55.

⁸² Tim Museum Kebangkitan Nasional, *H.O.S. Tjokroaminoto: Penyemai Pergerakan Kebangsaan & Kemerdekaan*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, 2015, hlm. 119.

Badan federasi PPPKI terbentuk bermula ketika Kongres Partai Sarekat Islam di Pekalongan pada Januari 1927 yang mana pada kongres tersebut Soekarno memberikan gagasan untuk dibentuk sebuah perkumpulan partai politik sebagai sarana pergerakan nasional. HOS. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim kemudian menyetujui usulan Soekarno dan menunjuk Soekiman sebagai penanggung jawab dari Partai Sarekat Islam untuk membentuk badan federasi tersebut.⁸³ Kedua tokoh yang berlainan secara ideologis tersebut dapat berdiskusi hingga memunculkan gagasan demi tercapainya persatuan pergerakan rakyat Indonesia, meskipun dalam prosesnya tetap terjadi perbedaan pendapat dari antar ideologi tersebut. Kerjasama antara Soekiman dan Soekarno menghasilkan sebuah anggaran dasar bagi PPPKI yang telah keduanya rundingkan pada April 1927, selain itu Soekiman juga berhasil menyakinkan Partai Saarekat Islam untuk bergabung bersama badan federasi ini.⁸⁴ Soekiman berhasil menunjukkan perannya sebagai kaum pergerakan nasional untuk mencapai Indonesia merdeka dan bekerjasama dengan tokoh-tokoh lainnya. Ia juga tidak segan untuk berkompromi dengan orang yang tidak seideologis seperti Soekarno.

Federasi ini kemudian secara resmi dibentuk di Sekolah Taman Siswa Bandung pada 17 Desember 1927, mereka yang bergabung tidak harus seideologi maupun kelompok tertentu karena tujuan dibentuknya badan ini untuk menampung partai-partai yang ada di Indonesia untuk mencapai Indonesia merdeka.⁸⁵ Mereka

⁸³ Handri Raharjo, *Metamorfosis Sarekat Islam*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2019, hlm. 152.

⁸⁴ Lukman Hakiem, *op. cit*, hlm. 74.

⁸⁵ Peter Kasenda, *Sukarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933*. Depok: Komunitas Bambu, 2010, hlm. 36-37.

yang bergabung antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond, Indonesische Studieclub Algemeene, Sarekat Sumatera dan Perhimpunan Kaum Betawi. Mereka yang bergabung merupakan kelompok-kelompok dari berbagai kalangan dan ideologi namun dapat disatukan dengan tujuan yang sama.⁸⁶ PPPKI dibentuk bertujuan untuk menyelaraskan arah pergerakan kebangsaan dengan merancang sistem keorganisasian yang efektif dan efisien, dengan tanpa perselisihan antar anggota di dalamnya. Dengan demikian, tidak ada partai yang mendominasi pada perkumpulan ini, hanya kesepakatan yang telah disetujui secara bersama-sama.

Keanggotaan PSII dalam PPPKI tidak bertahan lama, keduanya berpisah tiga tahun kemudian tepatnya pada 1930, penyebabnya adalah PSII tidak menyetujui pasal 1 Anggaran Dasar Permufakatan PPPKI yang dianggap berlawanan dengan Anggaran Dasar yang berada di PSII dengan menyebutkan pemberian status keanggotaannya bagi semua orang Islam tanpa memperdulikan kebangsaannya.⁸⁷ Menurut Mohammad Hatta, badan federasi yang dibentuk pada 17 Desember 1927 ini juga terlalu tersentralkan pada Soekarno dan Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam setiap pengambilan keputusan, padahal dalam suatu kelompok setiap anggotanya berhak untuk menyampaikan pendapat atau mengajukan keberatan pada keputusan yang dirasa kurang tepat.⁸⁸ Mohammad Hatta juga menyampaikan

⁸⁶ A. K. Pringgodigdo, *op cit*, hlm. 84

⁸⁷ Abdulah Khusairi, "Organisasi Massa Islam Awal Abad 20; Telaah Terhadap Perjalanan Gerakan Sarekat Islam", *Hikmah*, Vol 13, No. 2, 2019, hlm. 252.

⁸⁸ *Daulat Ra'jat*, 30 November 1933 memberitakan tentang alasan keluarnya PSII dari PPPKI. Dapat dilihat dalam lampiran 6.

bahwa PPPKI mengalami krisis ideologi dan impotensi yang kemudian menyebabkan federasi ini mengalami perpecahan hingga akhirnya tidak aktif lagi sejak 1934. Sebagaimana sebuah perkumpulan yang isinya orang-orang dengan pemikiran yang beragam, perpecahan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari namun kerjasama antara PSII dengan kelompok lainnya menjadi sebuah catatan tentang pentingnya persatuan dalam mencapai tujuan.

Riwayat organisasi Soekiman berlanjut ketika ia mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) yang dibentuk pada 4 Desember 1938 di Surakarta. Partai ini terbentuk akibat dari perseteruan di internal PSII antara golongan muda dengan Soekiman dan golongan tua dengan H. Agus Salim.⁸⁹ Soekiman yang pada saat itu ditunjuk sebagai ketua dewan pengurus Perserikatan Pegawai Pegadaian Hindia (PPPH) menganggap perlu adanya perombakan sistem kepengurusan instansi ini. Soekiman berusaha memperjuangkan nasib para pekerja PPPH yang mengalami pemecatan oleh Pemerintah Kolonial Belanda salah satunya dengan propaganda melalui surat kabar.⁹⁰ HOS. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim merasa tersinggung dengan perlakuan dilakukan Soekiman yang menyebut bahwa kepengurusan PPPH tidak terorganisir, ia menganggap Soekiman telah mencoreng nama baiknya dan partainya. Soekiman bersikap kritis dalam permasalahan ini. Ia tidak segan melontarkan kritik sekalipun yang dihadapinya adalah seorang pimpinan tertinggi partai.

⁸⁹ Mukayat, *Haji Agus Salim: Hasil Karya dan Pengabdianya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, hlm. 54.

⁹⁰ Endan Hamdan Ridwan, *Konsep Pendidikan Islam Perspektif H.O.S. Tjokroaminoto*. Bandung: Cendekia Press, 2019, hlm. 57

PSII menyikapi permasalahan ini kemudian melaksanakan kongres yang diadakan di Jakarta pada 5-12 Maret 1933 dengan menghasilkan keputusan untuk mengeluarkan Soekiman, Surjopranoto dan beberapa rekannya dari partai ini.⁹¹ Pimpinan partai menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Soekiman dan kawan-kawannya terlalu ceroboh dan tanpa koordinasi dengan pengurus inti partai. HOS. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim yang kemudian memutuskan mengeluarkan Soekiman dari PSII menimbulkan respon dari beberapa pihak, seperti yang diberikan dalam surat kabar *Sinar Deli* bahwa dikeluarkannya Soekiman dan kawan-kawannya dianggap janggal karena hanya berdasarkan asumsi satu pihak saja.⁹² Soekiman dan kawan-kawannya yang dikeluarkan kemudian membentuk Partai Islam Indonesia (PARII) pada bulan Mei 1933 dengan pusatnya berlokasi di Yogyakarta dengan Soekiman menjadi pemrakarsa dan juga sebagai ketuanya.⁹³

Soekiman dan kawan-kawannya di PARII sempat bergabung kembali dengan PSII pada 1937 saat Kongres PSII ke-23 di Bandung, namun hubungan keduanya hanya bertahan satu tahun sebelum dan kembali renggang dengan alasan PARII tidak mendapat posisi strategis dalam kepengurusan PSII.⁹⁴ Partai ini kemudian mendeklarasikan pendiriannya dengan nama yang sama namun dengan akronim yang berbeda menjadi PII pada 4 Desember 1938 di Surakarta. Raden Wiwoho Purbohadidjojo kali ini dipercaya sebagai ketua PII dengan didampingi Soekiman

⁹¹ Suratmin, *R.M. Abikusno Cokrosuryo: Hasil Karya dan Pengabdianya*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982, hlm. 88.

⁹² *Sinar Deli*, 19 April 1933.

⁹³ Chiara Formichi, *Islam and The Making of The Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in Twentieth-century Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 2021, hlm. 56.

⁹⁴ A.K. Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm. 148.

sebagai wakilnya. Kepengurusan PII kali ini didominasi oleh anggota Muhammadiyah pada tingkat pusat seperti K.H. Mas Mansur dan Abdul Kahar Muzakkir, sedangkan pada tingkat daerah tidak hanya dari Muhammadiyah namun ada organisasi lainnya seperti PII cabang Bandung yang dipimpin oleh Mohammad Natsir.⁹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada dominasi kelompok tertentu di pusat, PII tetap membuka ruang bagi keragaman dalam kepemimpinan di tingkat lokal dengan menempatkan tokoh-tokoh yang dianggap oleh Soekiman kompeten untuk menjadi pimpinan cabang agar pergerakan partai ini tetap masif dan terorganisir.

Raden Wiwoho Purbohadidjojo menanggalkan jabatannya pada 11 April 1940 ketika Kongres PII pertama di Yogyakarta dan digantikan oleh Soekiman. PII di bawah pimpinan Soekiman mengupayakan untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis dengan diisi oleh pribumi, serta memajukan kehidupan pribumi dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah kolonial Belanda.⁹⁶ Soekiman menuntut agar menghapus kebijakan *Exorbitante Rechten* atau hak kekuasaan gubernur, ia berpendapat bahwa kebijakan itu menindas masyarakat pribumi dan merugikan mereka.⁹⁷ Ia juga mengharapkan persatuan umat Islam agar usaha tersebut terwujud, karena tidak bisa berjalan apabila dilakukan secara individu apalagi saling menyikut satu sama lain demi kepentingan pribadi.

⁹⁵ Yudi Latif, *Indonesian Muslim Intelligentsia and Power*. Singapore: ISEAS Publishing, 2008, hlm. 241

⁹⁶ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1988, hlm. 178-179.

⁹⁷ Amir Hamzah Wiryosukarto, *op.cit.*, hlm. 105-106.

Posisi PII mulai melemah ketika kedatangan Jepang ke Indonesia untuk berkuasa, karena mereka melarang segala aktivitas perkumpulan politik. PII kemudian memutuskan untuk meneruskan perjuangannya dengan bergabung bersama Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) untuk bekerja sama dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.⁹⁸ Riwayat PII secara resmi berakhir pada Mei 1942, namun perjuangan Soekiman di arena perjuangan kemerdekaan tetap berlanjut melalui MIAI, yang orientasinya tidak ke ranah politik karena sudah dilarang oleh Pemerintahan Jepang. MIAI kemudian bertransformasi menjadi Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia pada era pendudukan Jepang dan kemudian berlanjut hingga masa awal kemerdekaan dengan menjadi partai politik Islam.

Partai Masyumi⁹⁹ merupakan partai politik Islam yang berdiri pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Partai ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari adanya Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945 yang isinya berupa anjuran untuk membentuk partai politik bagi rakyat Indonesia.¹⁰⁰ Tokoh-tokoh Islam dan para ulama yang mendengar informasi Maklumat tersebut merespon dengan baik. Mereka beranggapan dengan adanya maklumat tersebut umat Islam dapat dipersatukan dalam satu wadah perkumpulan. Ulama-ulama tersebut kemudian merencanakan untuk menyelenggarakan pertemuan bagi ulama-

⁹⁸ Muhammad Iskandar., dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam Jilid 3: Institusi dan Gerakan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, hlm. 298.

⁹⁹ Pada bagian selanjutnya istilah Partai Masyumi akan disebut dengan Masyumi.

¹⁰⁰ Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi vol 2*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011, hlm. 115.

ulama untuk membicarakan masalah ini, sebagai sarana aspirasi umat Islam melalui partai politik yang dilakukan beberapa hari kemudian pasca keluarnya maklumat.¹⁰¹

Para ulama tersebut kemudian menyelenggarakan pertemuan yang dikenal sebagai Mukhtar Umat Islam Indonesia yang berlangsung pada 7-8 November 1945 yang berlokasi di gedung Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan seperti aktivis pergerakan Islam, pimpinan lembaga pendidikan Islam, pejabat pemerintahan dan tentunya ulama-ulama serta tokoh-tokoh penting dari organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain.¹⁰² Mukhtar ini kemudian menghasilkan keputusan bahwa Masyumi merupakan partai politik satu-satunya di kalangan umat Islam, bersiap untuk terlibat dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta menunjuk Soekiman sebagai ketua Pengurus Besar Partai Masyumi.¹⁰³ Keputusan ini menunjukkan bahwa Masyumi dibentuk sebagai sarana persatuan umat Islam melalui perkumpulan politik, selain itu menunjuk Soekiman juga sebagai representasi pemimpin Islam dengan rentetan pengalamannya dalam dunia politik seperti ketua Perhimpunan Indonesia (PI), aktivis di Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan pendiri Partai Islam Indonesia (PII).

Penunjukan Soekiman sebagai ketua Masyumi yang dianggap sebagai representasi pemimpin Islam tidak lepas dari kompetensinya sebagai organisatoris dalam sebuah kelompok atau organisasi. Pengalamannya yang pernah menjabat

¹⁰¹ Naufal Al-Zahra, *op.cit.*, hlm. 30-31.

¹⁰² Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2013, hlm. 330-331..

¹⁰³ Lukman Hakiem, *Utang Republik Pada Islam: Perjuangan Para Tokoh Islam Dalam Menjaga NKRI*. Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021, hlm. 52-53.

sebagai ketua Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda serta sebagai pendiri Partai Islam Indonesia (PII) dianggap cukup oleh peserta Mukhtar di Yogyakarta kala itu untuk menjadikan Soekiman sebagai ketua Masyumi. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Mattayang tentang teori kepemimpinan dengan salah satunya adalah tipe pemimpin demokratis, yaitu tipe pemimpin yang mempunyai kapabilitas untuk mempengaruhi orang banyak untuk merumuskan tujuan dan langkah suatu organisasi atau kelompok yang dilakukan secara kolektif.

Masyumi pada era awal kepemimpinan Soekiman menyatakan sikap oposisi terhadap pemerintahan, namun tetap mengizinkan anggotanya masuk kabinet tetapi atas nama pribadi bukan sebagai delegasi partai. Soekiman melakukan hal ini dilandasi atas dasar keputusan Mukhtar yaitu mendesak agar pemerintah segera melakukan tindakan agar Pasukan Sekutu segera meninggalkan Indonesia, sedangkan putusan lain yang menjadi alasan Soekiman mengizinkan anggotanya masuk kabinet adalah Masyumi dibentuk untuk memperkuat barisan pertahanan negara, yang salah satunya adalah menyumbangkan buah pemikiran tokoh-tokoh yang masuk pemerintahan.

Soekiman menjabat sebagai ketua Masyumi selama empat tahun yaitu dari 1945 sampai 1949 yang mana pada saat itu Indonesia berusaha mempertahankan kedaulatannya. Masyumi di bawah pimpinan Soekiman merupakan partai oposisi pemerintah yang pada saat itu menganut sistem parlementer. Soekiman sebagai ketua tetap mengizinkan anggota-anggotanya untuk masuk ke dalam susunan pemerintahan yang pada saat itu dipimpin oleh Sutan Sjahrir pada periode 1945-

1947 dan Amir Syarifuddin periode 1947-1948.¹⁰⁴ Mereka yang bergabung¹⁰⁵ dengan Kabinet Sjahrir dan Kabinet Amir Sjarifuddin merupakan atas nama pribadi dan tidak sebagai delegasi Masyumi, alasan tetap diizinkan bergabung adalah sebagai bentuk pengabdian pada negara.

Pemerintah Indonesia yang tengah menghadapi masa revolusi berupaya untuk mempertahankan kedaulatannya salah satunya ditempuh melalui jalur diplomasi. Sutan Sjahrir ditunjuk sebagai ketua delegasi pada Perjanjian Linggajati yang berlangsung pada 15 November 1946 di Kuningan.¹⁰⁶ Masyumi di bawah pimpinan Soekiman menolak hasil perundingan tersebut, alasannya karena Sjahrir terlalu lunak terhadap pihak Belanda dan hasil dari perundingan itu merugikan Indonesia dengan wilayahnya yang menjadi menyusut dengan hanya mencakup Sumatera, Jawa dan Madura.¹⁰⁷ Masyumi menuntut agar pemerintah segera mengambil tindakan dari tindakan Belanda yang sewenang-wenang.¹⁰⁸ Menurut Soekiman sistem parlementer tidak cocok diterapkan di Indonesia, ia beranggapan bahwa lebih setuju jika menerapkan sistem presidensial karena dapat menjaga

¹⁰⁴ Remy Madinier, *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party Between Democracy and Integralism*. Singapore: NUS Press, 2015, p. 81-82.

¹⁰⁵ Beberapa anggota Partai Masyumi yang bergabung dengan dalam Kabinet Sjahrir dan Kabinet Amir di antaranya yaitu Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, K.H. Faturrachman, Jusuf Wibisono, H.M. Rasjidi, Kasman Singodimejo, K.H. Masykur, dan R. Sjamsoeddin. Sedangkan Soekiman baru bergabung ke pemerintahan saat kabinet dipimpin oleh Moh. Hatta. Lihat dalam Kementerian Penerangan, *Susunan Kabinet 2 R.I. dan Riwayat Hidup Ringkas Para Menteri 1945-1953*. Jakarta: Bagian Dokumentasi Kementerian Penerangan, 1954, hlm. 2-9.

¹⁰⁶ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Balai Pustaka: Jakarta: 1984, hlm. 211-212.

¹⁰⁷ Iin Nur Insaniwati, *Mohamad Roem: Karier Politik dan Perjuangannya*. Magelang: Yayasan Indonesiatara, 2002, hlm. 67.

¹⁰⁸ Berita mengenai penolakan Masyumi terhadap hasil Perjanjian Linggajati diliput dalam surat kabar *Soeara Oemoem*, 15 Januari 1947. Dapat dilihat dalam lampiran 7.

stabilisasi kabinet yang hanya dapat diubah Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹⁰⁹ Sikap Masyumi sebagai oposisi tetap konsisten yang juga nantinya dirasakan oleh Kabinet Amir Sjarifuddin.

Amir Sjarifuddin kali ini dipercaya sebagai ketua delegasi dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara melalui Perjanjian Renville yang diselenggarakan pada 8 Desember 1947 di kapal USS Renville.¹¹⁰ Perjanjian ini kembali ditentang oleh banyak pihak termasuk Masyumi karena telah merugikan negara Indonesia. Masyumi menganggap Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Amir Sjarifuddin pada 17 Januari 1948 kembali memperkecil wilayah kedaulatan Indonesia dan Amir Sjarifuddin yang dianggap tidak melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kabinet terlebih dahulu yang pada saat itu diisi oleh partai yang beragam pandangannya.¹¹¹ Soekiman sebagai ketua partai dan didukung oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) memutuskan untuk menarik dukungannya terhadap Kabinet Amir yang kemudian Amir Sjarifuddin menanggalkan jabatannya pada 23 Januari 1948 dan kemudian digantikan oleh Mohammad Hatta.

¹⁰⁹ Amir Hamzah Wiryosukarto, *Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot*. Malang: YP2LPM, 1984, hlm. 258.

¹¹⁰ Aman, *sejarah indonesia masa kemerdekaan 1945-1998*. Yogyakarta: Ombak, 2015, hlm. 28.

¹¹¹ Alfi Hafidh Ishaqro, "Dinamika Partai Masyumi Pada Masa Revolusi Fisik (1945-1945)", *Jurnal Agastya*, Vol. 2, No. 5, 2015, hlm. 38